

# **KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DALAM MENANGANI PENYELUDUPAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

**PUTERI NUR SHALIHA**  
Universitas Abdurrah  
Puterinurshaliha16@student.univrab.ac.id

## ***Abstrak***

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia yaitu kawasan segitiga emas atau *golden triangle* di Thailand, Myanmar, dan Laos. Dalam periode tahun 1970 hingga tahun 2000, segitiga emas menjadi pusat produksi opium, dan heroin. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya peredaran gelap narkoba antara Malaysia-Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Pada dasarnya kedua negara telah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Indonesia terhadap Malaysia dalam menangani penyeludupan narkoba di Provinsi Riau Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerja sama internasional dari K.J Holsti (1998). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam upaya pemberantasan penyeludupan narkoba dengan melaksanakan beberapa kebijakan yaitu kedua negara melakukan pertukaran informasi guna pencegahan, penangkapan, dan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika. Perwujudan kerjasama Indonesia-Malaysia tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan MoU GBC Malindo (*General Border Committee* Malaysia-Indonesia) tahun 2010, Direktorat Polair Polda Riau dengan Polisi Diraja Malaysia melakukan penandatanganan kerjasama, Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama Antara POLRI dan PDRM, dan Pertukaran Informasi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Indonesia, Malaysia, Penyeludupan Narkoba, Joko Widodo

## PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini di tunjukan oleh jumlah pengguna narkoba di Indonesia dari tahun 2014-2019 dibawah ini:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia Tahun 2014-2019**

No	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2014	4,2 Juta
2	2015	4,1 Juta
3	2016	3,8 Juta
4	2017	3,2 Juta
5	2018	3,5 Juta
6	2019	3,6 Juta

Sumber: BNN, 2020

Berdasarkan data Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba pada tahun 2017 hingga 2019. Ini artinya masalah penggunaan narkoba di Indonesia belum bisa ditangani dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa hal di antara nya karena :(1) posisi Indonesia yang terletak di antara tiga benua; (2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) arus transportasi yang sangat maju.

*Pertama*, posisi Indonesia yang terletak di antara tiga benua hal ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya perdagangan narkoba di Indonesia. Dibukanya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara melalui *Asean Free Trade Area* (AFTA), telah dimanfaatkan oleh pengedar narkotika untuk mengembangkan pengaruhnya, mengingat di wilayah tersebut terdapat daerah segitiga emas yaitu Laos, Myanmar dan Thailand, Segitiga Emas adalah kawasan di bagian utara Asia Tenggara yang meliputi Burma, utara Laos dan bagian utara Thailand. Dalam perkembangannya, wilayah segitiga emas tidak hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi juga mampu menghasilkan heroin dan jenis-jenis narkotika seperti *amphetamine*, *methamphitamin*, dan *yaa'ba*. Kelima jenis inilah yang banyak diproduksi dan beredar di kawasan segitiga emas. Masalah inilah yang menjadi tantangan besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Seiring dengan kecenderungan globalisasi, perdagangan narkoba tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi,

modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dandikenal sebagai 'transnational organized crime' yang sangat membahayakan (UNODC, 2018).

Dalam peta perdagangan narkoba dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari 'negara transit' menjadi 'negara tujuan' perdagangan narkoba ilegal. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Sifat sebagai negara kepulauan terbesar (17.508 pulau) dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang, sangat memungkinkan menjadi daerah target produsen opium terbesar di Asia: *Golden Triangle* dari Laos, Thailand dan Myanmar; *Golden Crescent* dari Iran, Afghanistan, Pakistan serta Amerika Latin terutama Peru, Bolivia, Kolombia (Simanungkalit, 2011).

Berikut gambar pintu masuk narkoba ke Indonesia dari negara lain.



**Gambar 1.**  
**Pintu Masuk Narkoba Ke Indonesia**

Sumber: Liputan6, 2015

Jalur narkoba ilegal ke Indonesia secara konvensional adalah melalui berbagai pelabuhan udara di berbagai kota di Indonesia. Peredaran gelap narkoba melalui udara dari luar negeri ke Indonesia tercatat meliputi Amerika Serikat-Jakarta; Malaysia-Jakarta; Malaysia-Tangerang; Nairobi-Abu Dhabi-Jakarta; Tiongkok-Jakarta; Belanda-Jakarta; Iran-Jakarta; Ghana-Jakarta-Surabaya; Nigeria-Jakarta-Bekasi; Nairobi-Doha-Jakarta; Kuala Lumpur-Jakarta-Surabaya; Malaysia-Jakarta-Bandung; Guangdong-Jakarta; Hong Kong-Jakarta (BNN, 2015). Namun, seiring dengan semakin ketatnya pengawasan di bandara, jalur laut formal maupun ilegal menjadi alternatif pengganti.

Gambar 1 menunjukkan titik masuk jalur sabu dari Malaysia (Melaka dan Serawak), Papua Nugini dan Timor Leste ke kota pelabuhan terdekat untuk kemudian didistribusikan ke berbagai kota di Indonesia. Peredaran gelap narkoba melalui laut dari luar negeri ke Indonesia meliputi Malaysia-Entikong-Sanggau/Pontianak; Tiongkok-Jakarta; Malaysia- Nunukan-Pare-pare-Pinrang; Malaysia-Pontianak-Semarang-Kediri; Malaysia-Tanjung Balai Karimun; Malaysia-Aceh Timur; Malaysia-Tanjung Balai-Aceh Timur; Iran-Jakarta-Sukabumi. Sementara jalur domestik atau dalam negeri umumnya merata di jalur Aceh-Pekanbaru-Jakarta; Pontianak-Jakarta; Jakarta-Denpasar; Jakarta-Bekasi; Jakarta-Surakarta; Jakarta-Surabaya; Jakarta Pontianak; Jakarta-Surabaya-Banjarmasin; Jakarta-Samarinda; Bogor- Sukabumi; Jakarta-Makasar; Jakarta-Indramayu; Pontianak-Tj. Hulu-Pontianak; Pontianak-Bandar Lampung; Nunukan-Pare-pare-Bone; Pekanbaru-Natar/Lampung; Kualanamu-Cipayung/Jakarta (BNN, 2015).

Faktor *kedua* meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi yang sedang berlangsung tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penaggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Saat ini transaksi perdagangan yang dilakukan tidak secara langsung tetapi pelaku mengandalkan internet sebagai media transaksi.

Dikutip dari VOA Indonesia (2012) Kepala Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2012, mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna internet mencapai 40 juta orang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat pengedar narkoba jaringan internasional sebagai media untuk memasarkan narkoba secara online. Selanjutnya pada tahun 2015 Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa peredaran narkotik dengan menggunakan internet terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi baik dari nilai transaksi maupun dari jumlah yang diperdagangkan (CNN, 2015). Selanjutnya pada tahun 2020 Kepala BIN kembali mengungkapkan bahwa Peredaran narkoba selama

pandemi virus Corona mengalami peningkatan, terutama dalam dua bulan terakhir (April-Mei). Para pengedar narkoba memanfaatkan sistem daring atau secara online dalam bertransaksi (Serambinews, 2020).

Faktor *ketiga* adalah arus transportasi yang sangat maju. Transportasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Perkembangan globalisasi memberikan dampak baik positif maupun negatif. Kemudahan komunikasi dan transportasi melintas batas antar negara membuat mudahnya arus manusia dan barang (Rahman, 2016). Derasnya pengaruh globalisasi, memberikan tantangan baru bagi tiap negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan-kejahatan baru timbul dengan melintasi batas negara (transnasional). Berbagai bentuk aksi kejahatan transnasional antara lain seperti perdagangan narkoba. Berbagai aksi kejahatan transnasional di atas dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dikarenakan lemahnya pengawasan negara terhadap kawasan perbatasan dan pembangunan kesejahteraan di perbatasan yang belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu, batas dan luas teritorial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan eksistensi sebuah negara (Deplu, 2010). Salah satu mode transportasi yang digunakan dalam mengedarkan narkoba ke Indonesia adalah melalui jalur udara lewat pesawat terbang dan melalui jalur laut lewat kapal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu jalur masuknya narkoba ke Indonesia adalah melalui Malaysia. Jalur tersebut menjangkau beberapa daerah yang ada di Indonesia. Malaysia menjadi salah satu jalur strategis bagi masuknya narkoba ke Indonesia. Berdasarkan data dari BNN berikut jalur penyeludupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia:

1. Penang (Malaysia) – Medan – Jakarta
2. Kuala Lumpur (Malaysia) – Surabaya
3. Malaysia – Jakarta
4. Malaysia – Batam
5. Malaysia – Aceh
6. Malaysia – Pekanbaru

Dalam mengatasi penyeludupan narkoba diantara kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia telah mengambil beberapa kebijakan. Indonesia dan Malaysia sama-sama memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika. Sedangkan Malaysia menggunakan Undang-Undang Malaysia tentang Obat Berbahaya tahun 1952 (Malaysian Law Dangerous Drugs Act 1952 section 39b). Namun hal ini belum terlihat memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku penyeludupan narkoba.

Salah satu daerah yang menjadi tempat masuknya narkoba dari Malaysia adalah Riau. Narkoba masuk ke Riau melalui Jalur dari Malaysia-Aceh-Riau. Jalur ini menjadikan Riau sebagai salah satu Provinsi dengan tingkat peredaran dan pengguna narkoba tertinggi di Indonesia (Liputan6, 2015).

Berikut data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Riau tahun 2014-2019

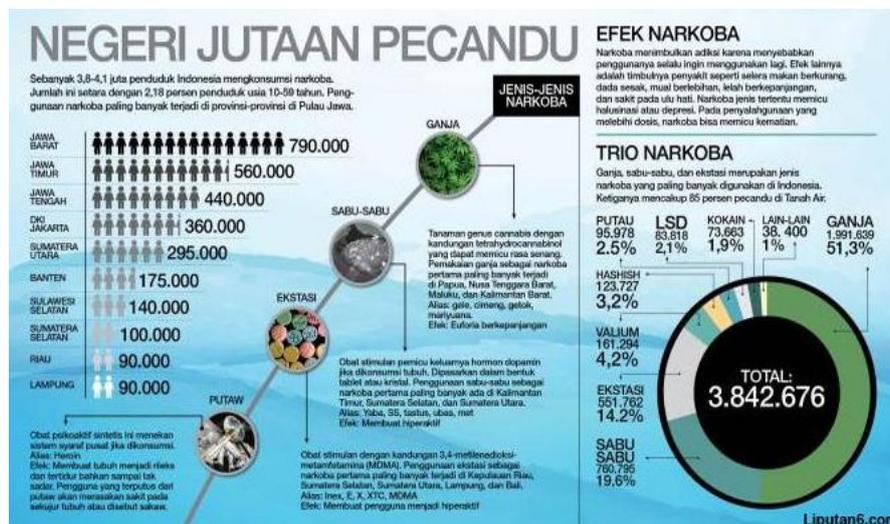
**Tabel 2.**  
**Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Riau Tahun 2014-2019**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (orang)
1	2014	955	1.350
2	2015	1.032	1.455
3	2016	1.481	2.020
4	2017	1.395	1.949
5	2018	1.839	2.653
6	2019	1.817	2.496

Sumber: Polda Riau, 2020

Berdasarkan data Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba pada tahun 2015, 2016 dan 2018. Ini artinya masalah penggunaan narkoba di Provinsi Riau belum bisa ditangani dengan baik.

Berikut gambar grafis Provinsi Riau dengan Provinsi lain dalam hal jumlah pengguna narkoba pada tahun 2015.



**Gambar 2.**  
**Pengguna Narkoba di Indonesia Tahun 2015**  
Sumber: Liputan6, 2015

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Provinsi Riau berada di posisi 9 dari 10 besar provinsi dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Hal ini tentu menjadi masalah yang serius.

Masalah yang dihadapi Provinsi Riau dalam memutus rantai penyeludupan narkoba dari Malaysia adalah pergantian rute. Para penyelundup setiap tahunnya memiliki rute baru untuk menyelundupkan narkoba. Jika jalur bandara tidak berhasil maka para penyelundup beralih ke pelabuhan. Ini yang membuat aparat kesulitan melacak rute penyelundupan selanjutnya. Selain bandara, salah satu rute penyeludupan narkoba ke Provinsi Riau dari Malaysia yaitu melalui pelabuhan Dumai. Pada tahun 2015, di pelabuhan Dumai pernah ditemukan dan disita sebanyak 1.075 gram ekstasi. Hal ini sesuai dengan keterangan dari BNN yang menyatakan dari data, 80 persen penyeludupan narkotika di dunia gunakan jalur laut, sementara di Indonesia mencapai 90 persen

Berikut Gambar 3 jalur masuk narkoba ke Provinsi Riau dari Malaysia.



**Gambar 3.**  
**Jalur Penyeludupan Narkoba Malaysia-Indonesia (Provinsi Riau)**  
Sumber: BNN, 2020

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa salah satu jalur penyeludupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia adalah melalui pelabuhan Dumai. Berikut data

jumlah kasus penyeludupan narkoba yang berhasil diungkap di Provinsi Riau yang melibatkan sindikat jaringan Malaysia.

**Tabel 3.**

**Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Riau dengan Sindikat Jaringan Malaysia**

No	Tahun	Kasus
1	2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada 4 September 2019, Polisi menangkap sindikat narkoba internasional jaringan Malaysia. Polisi telah meringkus para pelaku saat berada di Pekanbaru, Riau. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari keterangan tersangka yang sebelumnya ditangkap dengan barang bukti 30 kilogram sabu pada bulan Juni 2019 lalu di Siak, Riau. Sindikat ini akan menyelundupkan narkoba ke Jakarta yang dikirim dari Dumai, Riau (Merdeka.com, 2019)</li> <li>2. Polisi menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dikirim dari Malaysia. Penyelundupan itu dilakukan jaringan internasional atau sindikat Malaysia menggunakan kapal-kapal kecil di jalur tikus perairan Indonesia. Penggagalan penyelundupan itu dilakukan pada 7 September 2019 di perairan Sungai Daun, Riau. Terdapat lima orang tersangka inisial AS, IS, RA, BR dan RM ditangkap dengan barang bukti 23 kg sabu dan 28 ribu butir ekstasi (Merdeka.com, 2019)</li> <li>3. Pada 19 Oktober 2019, hampir 90 kilogram narkotika jenis sabu, 24.468 butir pil ekstasi dan 967 pil happy five disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dari 8 pria. Semua barang bukti diduga berasal dari sindikat narkoba internasional yang dikendalikan dari Malaysia (Liputan6, 2019).</li> </ol>
2	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada 5 Februari 2020, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau menggagalkan penyelundupan sabu seberat 35 kilogram narkoba jenis sabu dari Malaysia di Pelabuhan Rakyat Nerbit Besar, Dumai (Kompas, 2020)</li> </ol>

Sumber: Data Penelitian, 2020

Di kawasan Asia Tenggara terdapat salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia yaitu kawasan segitiga emas atau *golden triangle* di Thailand,

Myanmar, dan Laos. Dalam periode tahun 1970 hingga tahun 2000, segitiga emas menjadi pusat produksi opium, dan heroin (Antaraneews, 2016). Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya peredaran gelap narkoba antara Malaysia-Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Pada dasarnya kedua negara telah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka perlu kerjasama antar kedua negara Indonesia-Malaysia khususnya kebijakan yang perlu diambil terkait dengan penyeludupan narkoba yang terjadi di Provinsi Riau.

Kajian Ini mengambil rentang waktu kasus penanganan penyeludupan narkoba pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu rentang tahun 2014-2019. Pada rentang masa pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan narkoba telah dilakukan berbagai program diantaranya, misalnya pada tahun 2017, di dalam sebuah pidato tanggal 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan secara lisan memerintahkan tembak mati bagi para bandar narkoba berkewarganegaraan asing. Alasannya, Indonesia sudah dalam tahap "darurat narkoba". Sayangnya, pernyataan ini sama sekali tak diiringi langkah-langkah penguatan rehabilitasi bagi para pencandu narkoba. Alhasil, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar hingga mahasiswa (Tirto, 2017).

Selanjutnya pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan narkoba. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 23/2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). pertimbangan Perpres 47/2019 diterbitkan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kepala BNN diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Perpres ditandatangani Jokowi pada 4 Juli 2019. Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 8 Juli 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. (Berita Satu, 2019).

Untuk mengkaji lebih dalam tentang penanganan penyeludupan narkoba sesuai dengan gejala-gejala yang telah terjadi, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kebijakan Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Menangani Penyeludupan Narkoba Di Provinsi Riau Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo”.

## **STUDI LITERATUR**

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :

Nabiela Ramadhani (2019) “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016”. Penelitian ini menggunakan konsep national security atau keamanan nasional yang dicetus oleh Barry Buzan Hasil penelitian menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka peredaran narkotika di Indonesia ialah dengan dilakukannya peningkatan pengawasan dan keamanan nasional Indonesia terutama di wilayah perbatasan.

Dimas Triwibowo Herjuno (2017) “Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia-Indonesia (2010-2016). Penelitian ini menggunakan teori bilateral. Hasil penelitian ini menemukan bahwa upaya POLRI dalam menanggulangi peredaran narkotika dari Malaysia lebih terfokus kepada upaya penindakan hukum.

Simela Victor Muhamad (2014) “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat”. Penelitian ini menggunakan teori kejahatan transnasional dan kerjasama Multilateral. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Anggota DPR RI, terutama dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan masalah penyelundupan narkoba.

Sara Gabriella (2019) “Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia”. Peneliti menggunakan konsep rezim internasional menurut Stephen D. Krasner. Hasil akhir dari penelitian

ini adalah kerja sama dalam rezim membangun dan mempengaruhi bentuk penanganan konsisten yang dipilih oleh Indonesia terkait isu penyelundupan narkoba agar lebih “tertata” dan menjadi alasan untuk memperkuat kerja sama.

Ella Aditya Wardani (2018) “Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015”. Penulis menggunakan indikator kepatuhan dari teori kepatuhan, yakni *public policy trichotomy* yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell. Hasil penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok telah menunjukkan kerjasama yang cukup baik tetapi belum bisa memenuhi indikator dari kepatuhan.

Aldebaran Yudha Perwira (2019) dengan judul “Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (*National Narcotics Control Commissions*) Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012 – 2018”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepatuhan atau *compliance theory* (Simmons, 1998). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina sepakat untuk membuat kerja sama yang terkandung dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Muhammad Syahrial (2018) “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan lembaga penegak hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan metamfetamin lintas negara dari Malaysia ke Indonesia dari 2012-2016 di pos lintas batas di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Entikong) adalah sebagai pelindung perbatasan dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan, ekonomi dan kesehatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa banyak upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani penyeludupan sabu dengan melakukan kerjasama bilateral pada beberapa Negara. Bentuk kerjasama yang tertuang dalam hasil penelitian terdahulu hanya memuat satu atau beberapa kerjasama saja, tidak menjelaskan secara rinci hasil dari kerjasama tersebut apakah berpengaruh atau tidak serta upaya atau kerjasama tersebut dilakukan pada periode pemerintahan siapa, sehingga hasil penelitian

tersebut belum bisa menentukan kerjasama bilateral Indonesia apa saja yang telah dilakukan secara tepat dapat menjelaskan mengapa teori kerjasama Internasional penting dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam ranah studi hubungan internasional. Oleh sebab itu penelitian ini akan menjelaskan beberapa langkah kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dengan Malaysia dalam menangani penyeludupan narkoba di Provinsi Riau pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo secara rinci berdasarkan teori K.J. Holsti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Menurut buku Juliansyah Noor, Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## **PEMBAHASAN**

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, serta telah menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan. Dalam identifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang dijabarkan oleh PBB, dapat disimpulkan bahwa penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional.

Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah (BNN, 2016). Indonesia menjadi pangsa pasar narkoba yang sangat menjanjikan karena jumlah penyalahgunaan yang besar dan cenderung harga narkoba di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di luar negeri (BNN, 2015).

Salah Satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan bekerja sama dengan negara yang terkait dengan masalah penyeludupan

narkoba di Indonesia, salah satunya Malaysia. Dimana kerja sama tersebut dimulai dari tahun 2010 lewat penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchanment of Police Cooperation - Agreement on Information Exchanged and Establismnt of Communication Procedures* (kerangka kerjasama dalam pertukaran dan pembentukan prosedur komunikasi sebagai usaha untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama selama adanya peristiwa yang terjadi di wilayah perbatasan terkait kejahatan transnasional dan kegiatan illegal lainnya) (Istiqomah, 2016). Berikut capaian kerja sama kedua negara dalam mengatasi penyeludupan narkoba di Indonesia sebelum dan setelah kerja sama lewat MoU.

**Tabel 4. Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia Tahun 2014-2019**

No	Sebelum Kerja Sama		Setelah Kerja Sama	
	Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah (Orang)
1	2004	4,6 Juta	2012	4,4 Juta
2	2005	4,6 Juta	2013	4,3 Juta
3	2006	4,7 Juta	2014	4,2 Juta
2	2007	4,6 Juta	2015	4,1 Juta
3	2008	4,5 Juta	2016	3,8 Juta
4	2009	4,5 Juta	2017	3,2 Juta
5	2010	4,0 Juta	2018	3,5 Juta
6	2011	4,2 Juta	2019	3,6 Juta

Sumber: BNN, 2020

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka pengguna narkoba mulai tahun 2013 sampai tahun 2017, artinya ada pengaruh atau dampak positif dari kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2010.

Berikut diuraikan bentuk-bentuk kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengurangi angka penyeludupan narkoba.

#### **4.1 Respon Pemerintah Indonesia dan Malaysia Terhadap Peredaran Narkoba**

Dengan berkembang dan tingginya arus globalisasi yang terjadi, menyebabkan jalinan hubungan kerjasama antara negara semakin mudah, dan

bebas nya akses yang didapatkan oleh masyarakat dari berbagai negara, serta membuat setiap negara beserta masyarakat didalamnya semakin bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, yang menyebabkan terjadinya dunia tanpa batas (*borderless*). Namun berkembangnya globalisasi tidak selalu membawa dan memberikan keuntungan tapi juga terkadang menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional. Akibat dari berlangsungnya budaya global membuat timbulnya masalah-masalah keamanan non konvensional yang menjadi tantangan besar bagi perkembangan dunia di masa sekarang ataupun dimasa mendatang. Tidak terkecuali juga bagi kawasan Asia Tenggara. Perdagangan narkoba dan obat-obatan menjadi salah satu isu dan menjadi perhatian banyak negara dan masyarakat internasional.

Perdagangan narkoba yang telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional, secara garis besar meliputi empat jenis yaitu ganja (*cannabis*), kokain (*cocaine*), heroin, dan *amphetamine-type stimulants* (ATS). Dibukanya pasar bebas dikawasan Asia Tenggara melalui *Asean Free Trade Area* (AFTA), sangat dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba, mengingat di wilayah Asia Tenggara terdapat daerah yang dinamakan dengan segitiga emas, merupakan kawasan yang merupakan pengeluar candu heroin terbanyak di Asia Tenggara. Yaitu Laos, Myanmar dan Thailand yang dalam perkembangannya ketiga negara ini merupakan daerah yang menghasilkan heroin. Produksinya sekitar 1.000 ton dalam setahun (Priangani, Kunkunrat, dan Nurindah, 2020). Berikut ini merupakan data table jenis-jenis opium yang ditemukan dikawasan Asia, yakni:

#### **Tabel 5. Perkembangan Varian Obat-obat Terlarang di Dunia**

Drug Type	Trend in abuse		
	Increase	Stable	Decrease
Methamphetamine pills	Cambodia, Lao, PDR, Myanmar and Vietnam	-	Thailand
Methamphetamine crystal	Cambodia, Indonesia Thailand	Philippine	Brunei, Malaysia and Singapore
Ectasy	Brunei, Indonesia and Vietnam	Cambodia	Malaysia, Singapore Thailand
Heroin	Cocaine, Indonesia, Lao, PDR, Singapore, Vietnam	-	Malaysia, Myanmar and Thailand
Opium	Singapore	-	Cambodia, Lao, PDR, Malaysia
Cocaine	-	Thailand	-
Cannabis	Brunei, Philippine, Singapore, Thailand	Cambodia, Lao, PDR	Malaysia, Thailand
Ketamine	-	-	Singapore, Thailand
Barbiturates	Thailand		
Benzodiazepines	Thailand	-	Brunei, Myanmar, Singapore
Inhalants	Thailand	Cambodia	Malaysia

Sumber: ASEAN Narco Centre, 2016

Berdasarkan data tabel di atas setidaknya dapat memberi gambaran bahwa tingkat bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya di kawasan Asia Tenggara sudah pada tahap urgensi tinggi. Setiap negara ASEAN memiliki jenis narkoba tertentu disertai dengan jumlah tertentu. Mulai dari jenis narkoba yang masih berbahan mentah seperti opium mentah hingga jenis narkoba yang sudah dalam bentuk olahan seperti heroin maupun ATS (*amphetamine*) tersebar merata di masing-masing negara. Selain produksi opium yang menjadi bahan narkoba jenis heroin, maka varian lainnya yang terkenal di kawasan ini adalah varian narkoba yang mengandung obat sintetis.

Peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara saat ini sudah mengalami perubahan dalam tren jenis narkoba yang dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan dan pertumbuhan jenis obat – obat terlarang di kawasan ini dilakukan oleh mafia kartel transnasional narkoba untuk mengelabui petugas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk narkoba jenis ganja merupakan jenis narkoba yang dihasilkan di Indonesia. Berdasarkan data dari

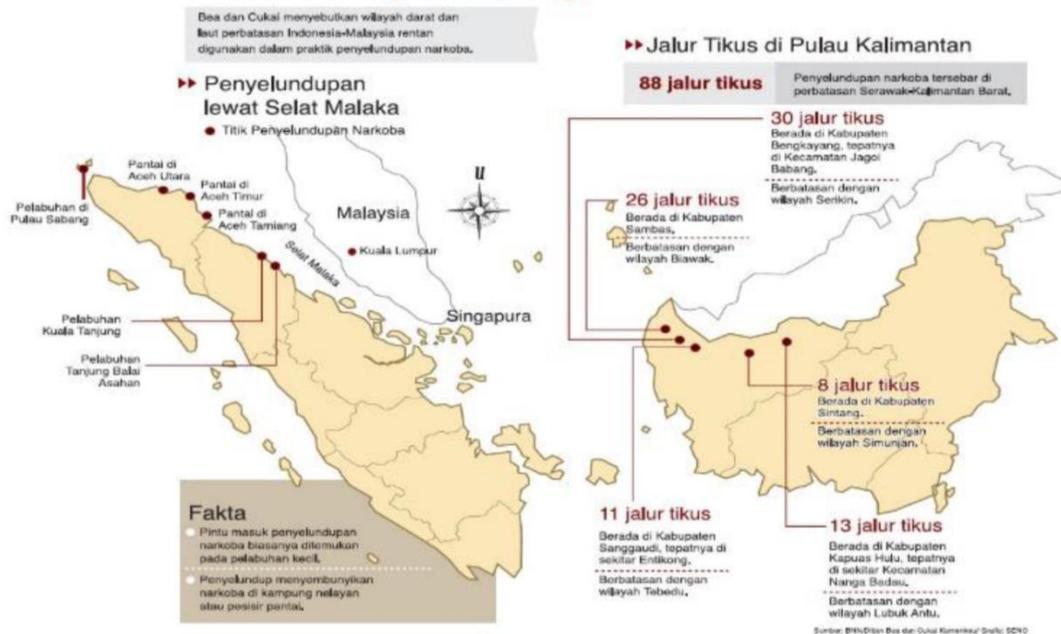
Badan Narkotika Nasional Indonesia maka ganja di Provinsi Aceh dijadikan sebagai obat rasa sakit dan bumbu penyedap masakan. Sedangkan jenis heroin dan sabu-sabu merupakan jenis narkotika yang terbuat dari bahan tanaman opium yang banyak ditemukan di region Asia Tenggara terutama di kawasan *golden triangle* yaitu diperbatasan tiga negara Myanmar, Laos dan Thailand. Adapun beberapa jenis narkotika yang dikonsumsi oleh negara – negara anggota ASEAN berdasarkan data dari *ASEAN Narcho Center* adalah sebagai berikut:

1. Ganja sebagian besar di konsumsi di Indonesia dan Filipina
2. Heroin, sebagian besar di konsumsi di Vietnam, Malaysia dan Singapura
3. Opium Kokain, sebagian besar di konsumsi di Myanmar dan Laos
4. Methamphetamine tablet, sebagian besar di konsumsi di Kamboja, Brunei Darussalam dan Filipina.
5. Methamphetamine ice, sebagian besar di konsumsi di Singapura, Indonesia dan Filipina.

Oleh karena itu perbedaan jenis konsumsi narkotika di setiap negara – negara di kawasan Asia Tenggara mengakibatkan kebijakan penanganan narkotika harus dilaksanakan secara terkoordinir melalui kerjasama antar negara karena jika dilakukan oleh masing-masing negara saja hasilnya tidak akan optimal.

Salah satu negara yang menjadi transit penyeludupan narkoba internasional adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang merupakan negara pasar sekaligus transit bagi peredaran narkoba internasional di kawasan Asia Tenggara, daerah Malaysia ini merupakan subtransit bagi narkoba yang ingin masuk ke Indonesia dan Australia, Sebagai negara tetangga, yang memiliki banyak akses untuk ke Indonesia, Malaysia kerap kali dimanfaatkan oleh jaringan narkoba skala internasional, untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke Indonesia. Menurut Direktur Narkoba Beny Joshua Mamoto bahwa: Malaysia sebagai negara yang kerap dimanfaatkan sebagai transit jaringan narkoba internasional untuk memasukkan narkoba ke pasar Indonesia, hal ini dengan memanfaatkan lemahnya pemeriksaan yang dilakukan dan juga banyaknya jalur - jalur illegal seperti pelabuhan tikus, jalur tikus diperbatasan baik laut maupun darat yang berada disepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di perbatasan kedua negara, hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan yang terbongkar berasal dari negara tersebut.

## Jalur Penyelundupan Narkoba



**Gambar 5. Jalur Penyelundupan Narkoba Melalui Perbatasan di Indonesia**  
 Sumber: Media Indonesia (Utami, 2016)

Berdasarkan Gambar 5 di atas menggambarkan proses masuknya narkoba dari negara Malaysia kemudian ke Indonesia melalui perbatasan baik itu perbatasan laut maupun perbatasan darat Indonesia perairananjung Balai Karimun, Batam dan terus tersebar melalui jalur darat, laut dan udara disebarkan ke kota-kota besar di Indonesia seperti Pekanbaru Riau, Jakarta, Surabaya, di wilayah tengah dan timur narkoba masuk dari perairan nunukan dan tawao di Kalimantan dan juga tersebar melalui jalur darat, udara dan laut menuju kota-kota besar di daerah tengah dan timur Indonesia. (BNN, 2015).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama memberikan respon yang tepat dan cepat terkait masalah penyelundupan narkoba terutama ke wilayah Provinsi Riau. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan suatu hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dikarenakan tujuan yang sama yaitu untuk menanggulangi permasalahan peredaran narkoba. Hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia Bersama organisasi-organisasi non pemerintah dalam menangani permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Malaysia menjadi salah satu negara yang memiliki andil atas meningkatnya

angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, selain itu Indonesia dan Malaysia juga telah menetapkan status darurat terhadap narkoba. Dikarenakan kedua Negara telah menjadi target dan tempat-tempat transit dari Negara pemasok narkoba seperti Iran, Nigeria, China, Amerika Latin, dan negara-negara segitiga emas yang berada di Asia Tenggara. Hampir 70% narkoba yang ada di Indonesia masuk ataupun berasal dari Malaysia.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Malaysia untuk mampu mengurangi ataupun menghambat perdagangan narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya *Forum General Border Committee* (GBC) Indonesia-Malaysia (Malindo) Tahun 2010 yang merupakan forum kerjasama perbatasan bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas keamanan kedua Negara khususnya untuk perbatasan di kedua negara.

#### **4.1 Indonesia – Malaysia Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman**

Indonesia dan Malaysia sebagai salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan memiliki kedekatan wilayah dan perbatasan tidak terlepas dari permasalahan perdagangan hingga penggunaan narkoba yang terjadi di kedua negara tersebut. Indonesia dan Malaysia telah lama sepakat terhadap perumusan kerjasama dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan baik didalam jalur darat maupun laut. Yang dituangkan dalam bentuk perjanjian *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT). Yang diusulkan oleh Malaysia pada saat pertemuan *ASEAN Senior Official Meeting* (ASLOM) yang diadakan di Bangkok Thailand, dan dalam perjanjian tersebut terdapat adanya bantuan hukum timbal balik dalam permasalahan kejahatan terutama narkoba (Priangani, Kunkunrat, dan Nurindah, 2020).

Untuk menangani peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, pemerintah di kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama seperti pertukaran informasi, penindakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama bilateral kedua negara untuk bersama-sama mengatasi peredaran dan perdagangan narkoba di kedua negara. Dan terdapat *Memorandum of Understanding (MoU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and*

*Enchanment of Police Cooperation - Agreement on Information Exchanged and Establishment of Communication Procedures* yang ditandatangani tahun 2010 (Istiqomah, 2016).

Kerja sama antara Provinsi Riau dan Malaysia juga diwujudkan dengan kedatangan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Wira Marzuki Bin Yahya pada November 2019 yang membahas peredaran narkoba yang masuk ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dari Negeri Jiran (Malaysia) (Goriau, 2019).



**Gambar 6. Pertemuan Gubernur Riau Syamsuar didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Datu Wira Marzuki Bin Yahya dalam membahas Upaya Pemberantasan Narkoba Kedua Wilayah**

Sumber: Goriau (2019)

Masalah narkoba ini, dikatakan Datuk Wira, akan dibahas dengan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Malaysia. Agar peredaran narkoba international yang melibatkan kedua negara yang bertetangga ini bisa dihalau dengan baik. Antara Malaysia dan Provinsi Riau akan dijalin kerjasama yang baik dalam memberantas peredaran narkoba yang bisa merusak generasi muda kedua negara. Gubernur Riau, Syamsuar menyambut baik kerjasama Malaysia memberantas narkoba dengan Provinsi Riau. Ia juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah memiliki Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan,

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemrov Riau sudah bergerak cepat dalam upaya memberantas narkoba di Riau. Tim Terpadu P4GN, terdiri dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan unsur terkait lainnya. Dengan adanya kerjasama memberantas narkoba dengan Malaysia diharapkan mampu meredam peredaran narkoba di Riau (Goriau, 2019).

Pemprov Riau mengantisipasi masuknya narkoba dari negara tetangga, Malaysia, di dua lokasi penyeberangan laut. Pemprov menggandeng otoritas dari negara tersebut untukantisipasi tersebut. Pada kesempatan lain Wakil Gubernur Riau Edy Nasution mengatakan dua lokasi yang memudahkan peredaran narkoba yaitu penyeberangan laut lewat kapal Roro. Pemerintah sedang membangun kerja sama Roro Dumai-Malaka, dalam waktu dekat ini akan dioperasikan, lalu ada juga akses Bengkalis-Johor, ini konsekuensinya memudahkan peredaran narkoba. Wakil Gubernur Riau mengatakan bahwa Riau menjadi daerah rawan dan provinsi tertinggi kelima dalam tingkat peredaran narkoba di Tanah Air. Karena itu pemda mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain adanya dua jalur laut seperti disebutkan tadi, daerah Riau memiliki pulau lain yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Misalnya pulau Rangsang dan Rukat. Di lokasi tersebut ada banyak pelabuhan tikus yang diwaspadai karena bisa menjadi jalur masuk barang haram tersebut ke Indonesia. Karena itu Pemprov Riau sudah sepakat dengan pemerintah Malaysia untuk ikut memerangi narkoba ini, bukan cuma membangun Roro (Gunawan, 2019).

#### **4.2 Direktorat Polair Polda Riau dengan Polisi Diraja Malaysia melakukan Penandatanganan Kerjasama**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan. Hal ini terbukti dengan wilayah perairan Indonesia yang berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara. Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Hukum laut Internasional oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan. Adapun total luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.8 juta km<sup>2</sup> wilayah daratan dan 3.2 juta km<sup>2</sup> wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km<sup>2</sup> laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),

dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010).

Berdasarkan observasi penulis di lapangan maka ditemukan fakta bahwa peredaran atau penyelundupan modus operandi narkoba dari negara Malaysia ke Indonesia terutama yang melalui jalur masuk di wilayah Provinsi Riau menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Riau bahwa masuknya narkoba melalui masuk di Pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, masuk melalui Pelabuhan kecil atau pelabuhan ilegal dengan menggunakan kapal laut. Selain itu modus operandi lainnya adalah dengan narkoba tersebut ditelan didalamperut atau dimasukkan kedalam anus, disamarkan dalam Koper/Travel Bag dan dalam kemasan makanan, selanjutnya menggunakan perusahaan jasa pengiriman paket serta melalui pelayaran kapal *Ship To Ship*.

Dalam mengatasi kasus penyeludupan tersebut, Direktorat Polair Polda Riau dengan Polisi Diraja Malaysia melakukan penandatanganan kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu Polair Polda Riau dan Polisi Diraja Malaysia, pada Februari 2015 juga menggelar latihan beesama dengan tema "Rendevous 2015" di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal itu diungkapkan Kapol Riau brigjen Polisi Dolly B Hermawan. Dalam latihan ini Satuan Direktorat Polair Polda Riau didukung 2 unit kapal Baharkam Mabes Polri. Dua unit kapal tersebut sejak kemaren sudah di-BKO-kan ke Riau untuk keperluan latihan tersebut. Latihan ini merupakan agdenda rutin yang digelar 2 sampai 3 kali dalam setahun dengan tujuan menjalin silaturahmi dan solidaritas antara kedua kepolisian dari dunia negara, yakni Indonesia-Malaysia (Riau.co.id, 2015).

Pada November 2016, Direktorat Polair Polda Riau bekerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia dalam pengawasan barang ilegal melalui jalur Selat Malaka. Pengawasan paling ketat soal masuknya narkoba dari negeri jiran ke Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di perairan Gosong Robroy di Selat Malaka, Malaysia, Senin 21 November 2016. Kepolisian kedua negara sepakat berpatroli bersama dalam mengawasi masuknya barang ilegal dari malaysia dan Indonesia (Detik.com, 2016).



**Gambar 7. Penandatanganan Kerjasama Polda Riau dengan Polisi Diraja Malaysia**

Sumber: Detik.com (2016)

Penandatanganan ini dihadiri Kepala Marine Wilayah Dua Johor Malaysia ACP Poul Khieu Khon Chang yang didampingi ASP Nordin Ketua Polisi Marine Muar. Sedangkan dari Ditpolair Polda Riau dihadiri Wakil Direktur Polair Polda Riau AKBP Ignatius Suprpto, AKBP Muji Suprianto, Kapolres Bengkalis AKBP Hadi Wicaksono dan Kasat Polair Polres Bengkalis beserta Kasat Polair Polres Dumai.

Wadir Polair Polda Riau AKBP Ignatius Suprpto mengatakan bahwa mudahnya akses transportasi antara Malaysia dengan Indonesia yang hanya beberapa jam perjalanan membuat banyak tindak pidana yang terjadi. Seperti kejahatan human trafficking, penyelundupan bawang merah, dan lainnya. Selain trafficking, yang menjadi antisipasi adalah penyelundupan narkoba, kemaren Polair juga sudah berhasil menangkap, dan masalah penyeludupan narkoba akan dikembangkan terus dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas ini dipandang akan lebih mudah dengan akses-akses apa yang diperlukan agar saling mendukung antara Malaysia dan Indonesia (Detik.com, 2016).



**Gambar 8. Foto Bersama Polda Riau dengan Polisi Diraja Malaysia**

Sumber: Detik.com (2016)

Polres Bengkalis juga dilibatkan dalam kerjasama ini karena posisinya yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia dan Malaysia. Rendezvous (pertemuan) ini diadakan dalam setahun sekali, kemudian juga melaksanakan publikasi informal yang selama ini masih terjalin sangat bagus seperti penangkapan *speed boat Tiger Johor* yang dicuri dan masuk wilayah Bengkalis lalu diamankan. Sementara itu, ACP Poul Khiu Khon Chang mengapresiasi kerja sama ini dan diharapkan dapat membuahkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks kerja sama ini, termasuk dalam semua bidang yang terutama sekali dalam menguat undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan di perbatasan contohnya seperti aktivitas penyelundupan Narkoba, dan kerja sama kedua belah pihak dalam menangani secara bersama-sama yaitu melaksanakan patroli bersama maupun kerja sama yang lain. Terkait banyaknya narkoba diselundupkan dari Malaysia, Paul Khiu mengatakan peredaran itu bisa datang dari negara mana pun (Detik.com, 2016).

#### **4.2 Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama Antara POLRI dan PDRM**

Dalam melakukan koordinasi terhadap kasus penyeludupan narkoba, Pemerintah Indonesia menunjuk POLRI dan BNN sebagai instansi yang menjalankan tugas tersebut. Upaya untuk memberantas jaringan dan jalur masuk peredaran narkoba yang terjadi di Malaysia dan Indonesia, merupakan upaya yang telah

dilakukan oleh kedua Negara antara Pemerintah Indonesia melalui POLRI melakukan kerjasama dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dengan kehendak dan keinginan kedua Negara untuk menangani kejahatan transnasional hingga melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Kerjasama tersebut dikukuhkan dengan *General Border Committee* Indonesia-Malaysia. Yang mana penandatanganan Nota Kesepahaman antara POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005.

Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM, kerjasama antara dua instansi ini untuk dapat menanggulangi perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya. Pelaksanaan dari kerjasama ini diatur dalam protocol tentang Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkoba (narkoba, psikotropika), serta bahan-bahan berbahaya illegal serta peningkatan kerjasama kepolisian.

Bentuk koordinasi antara POLRI dan PDRM yaitu *police to police*, dimana melakukan pertukaran informasi pelaku penyelundupan narkoba. Dimana informasi yang didapatkan POLRI pada saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hasilnya kemudian akan diteruskan kepada PDRM. Hal tersebut bertujuan untuk menangkap serta mengungkap jaringan narkoba dari Malaysia, dimana POLRI meminta bantuan dari PDRM untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan dengan Bandar ataupun pengedar narkoba, kemudian meminta dilakukannya penangkapan.

POLRI dan PDRM juga melakukan pertukaran informasi seputar warga perbatasan yang terlibat tindak pidana narkoba. Hal ini ditunjukkan oleh pihak Polda Kalbar yang membangun kerjasama dengan PDRM Kontinjen Sarawak Malaysia. Bentuk kerjasama tersebut salah satunya dengan melakukan tukar menukar data warganegara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba. Kedua pihak juga membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani tahun 2010 antara Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dengan Pejabat Polis Kontinjen Sarawak tentang pelaksanaan bantuan penyelidikan terhadap kasus narkoba. Koordinasi dilakukan melalui surat maupun bertemu dengan *Liaison Officer* (LO) atau Konsul Malaysia terkait dengan warga negara Malaysia yang terlibat tindak pidana narkoba di Polda Kalimantan Barat.

Melalui kerjasama GBC Malindo Tahun 2010 diwujudkan kedalam pemberantasan permasalahan terhadap peredaran jaringan narkoba yang masuk atau keluar antara kedua negara akan lebih mengedepankan lembaga kepolisian. Dalam meningkatkan hal tersebut munculnya kerjasama yang dinamakan *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) yang mempunyai peranan penting untuk dapat memaksimalkan pengamanan di wilayah perbatasan kedua negara baik itu di perbatasan darat, laut, hingga udara. Pembentukan komite ini didasarkan karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara bahwa berbagai kegiatan ilegal yang terjadi di perbatasan harus segera diselesaikan secara hukum bukan hanya pendekatan militer.

Polisi Diraja Malaysia dan Polda Riau juga bekerja sama memperketat Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan strategis di dunia. Di Selat Malaka terdapat beragam aktivitas, mulai dari aktivitas perdagangan, nelayan sampai eksploitasi sumber daya lautnya. Namun di balik itu, pedagang narkoba diduga ikut memanfaatkan wilayah strategis yang menjadi batas antara Indonesia dan Malaysia tersebut (Merdeka.com, 2015).

Adanya sindikat narkoba tersebut, diakui Kepolisian Diraja Malaysia. Mereka menganggap perairan Selat Malaka menjadi pintu masuk, dan jalur peredaran narkotika dari dan ke negara Jiran tersebut. Assistance Comission Police Firdaus Bin Abdullah mengatakan bahwa Selat Malaka menjadi kawasan lalu-lalang peredaran Narkotika. Inilah yang perlu kita awasi secara bersama. Kepolisian Diraja Malaysia telah melakukan penjagaan di kawasan itu. Penjagaan dilakukan dengan menempatkan pos-pos penjagaan di wilayah pesisir Selat Malaka (Merdeka.com, 2015).

Kunjungannya Kepolisian Diraja Malaysia ke Mapolda Riau bertujuan untuk memantapkan komunikasi antarkedua institusi tersebut. Firdaus merasa sampai saat ini kerja sama antar Kepolisian Diraja Malaysia dan Polri sudah terjalin erat. Di lain pihak, Wakapolda Riau, Kombes Pol Abdul Gofur menjelaskan pertemuan tersebut bermanfaat bagi Riau khususnya untuk mencegah terjadinya aksi penyelundupan melalui kawasan perairan. Kedua belah pihak saling tukar informasi. Perluantisipasi di daerah pelabuhan tikus yang tidak terkontrol petugas, kita sama-sama mencegah. Kedua belah pihak juga sepakat menjaga kawasan perairan mereka. Polisi Diraja Malaysia melalui kepolisian airnya berkewajiban melakukan patroli dan pengawasan maksimal untuk mencegah masuknya narkotika dan barang

selundupan ke wilayah Riau, begitu pula sebaliknya juga berlaku untuk jajaran Polda Riau. Belakangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap NHH (55) warga asal Malaysia, penyelundup sabu seberat 46,5 kg asal Malaysia. Namun hingga saat ini, belum diketahui siapa bandar besar di Malaysia yang mengirim sabu tersebut ke Riau, Indonesia (Merdeka.com, 2015).

#### **4.3 Pertukaran Informasi**

Pertukaran informasi mengenai kasus-kasus narkoba yang terkait ke dua wilayah juga dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau dengan pemerintah Malaysia. Pada tahun 2020, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia bisa bekerjasama dalam mengatasi penyelundupan narkoba yang sedang marak di Riau. Pemrov Riau sudah punya tim yang menangani hal tersebut. Pemrov Riau juga bersinergi dengan BNN Riau dan Polda Riau untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba (Hallo Riau, 2020). Gubri mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia saat melakukan kunjungan ke Riau beberapa hari yang lalu, untuk bersama-sama dapat mencegah sekaligus membatasi masuknya narkoba dari Malaysia ke Riau. Pemrov Riau meminta bantu kepada Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia untuk membatasi dan sekaligus diharapkan jangan ada lagi narkoba masuk dari Malaysia ke Riau. Selain itu, dikarenakan daerah pesisir Riau cukup panjang, sulit mengawasi wilayah tersebut tanpa adanya kerjasama dari kedua negara, yaitu antara Indonesia maupun Malaysia. Sehingga dengan adanya kerjasama dari kedua negara ini, kita harapkan bisa membatasi peredaran narkoba ke Riau.

Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerjasama POLRI dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Balikpapan tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005. Bentuk kerja sama yang disepakati meliputi: (Interpol, 2005).

1. Pertukaran informasi.
2. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal.

3. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
4. Pertukaran pengalaman dalam metoda penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan.
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
7. Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.
8. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba dan bahan berbahaya yang baru.
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman.
10. Bantuan dalam investigasi money laundering.
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkoba dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
12. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.

Pelaksanaan dari kerjasama ini diatur dalam Protokol tentang Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika (narkoba, psikotropika), dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta Peningkatan Kerja sama Kepolisian. Peredaran narkoba dari Malaysia masuk melalui beberapa pintu masuk di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia. POLRI dan PDRM melakukan pertukaran informasi dalam menindak tindak kejahatan peredaran gelap narkoba.

Berangkat dari koordinasi pertukaran informasi yang dilakukan Polda Riau dan Polisi Diraja Malaysia, satu per satu kasus penyeludupan narkoba berhasil diungkap. Pada Oktober 2020, dilansir dari Okezone (2020) Polda Riau membongkar jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan mafia dari Malaysia. Petugas saat ini bekerjasama dengan pihak Kepolisian Malaysia untuk menangkap mafia yang merupakan warga negeri jiran tersebut. Dalam kasus ini, Polda Riau dan jajaran mengamankan puluhan kilogram sabu. Sementara kaki tangan warga Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia yang ditangkap, sebanyak 17

orang. Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan sebagian kaki tangan bandar asal Malaysia itu merupakan narapidana yang ada di berbagai lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia. Mereka dikendalikan oleh mafia narkoba dari Malaysia yakni Bu, Mr Uncle, dan Yas. Mabes Polri sudah melakukan kerja sama dengan Polisi Malaysia untuk menangkap mereka.

Sementara mengenai belasan tersangka ditangkap, Kapolda menjelaskan mereka ditangkap di berbagai lokasi dalam dua pekan terakhir. Contohnya beberapa waktu lalu Polres Bengkalis mengamankan 10 Kg sabu dari pengemudi mobil di Kapal Roro di Bengkalis. Di sana polisi menyita barang bukti 10 Kg sabu dan mengamankan tiga orang yakni Do, RA, dan TA. Dari pengembangan lagi diamankan RN di Pekanbaru. Mereka dikendalikan oleh Fitri narapidana Lapas Kelas II Bangkinang Kampar. Fitri ini dikendalikan oleh bandar dari Malaysia Mr Uncle. Kemudian Polres Kampar mengamankan sebanyak 13 Kg sabu. Barang bukti diamankan dari dua tersangka DE dan AS saat mereka melintas di Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu Kampar. Dari keduanya diamankan juga 10 ribu pil ekstasi dan dua pucuk senjata api.

Kemudian Polresta Dumai mengamankan 14 Kg sabu. Barang haram itu diamankan dari tersangka RW. Kemudian dari hasil pengembangan, diamankan beberapa tersangka lain yakni Ap dan FH. Sedangkan tim Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap jaringan kelompok Busu. Jaringan nya adalah Malaysia-Riau-Malang-Surabaya-Madura. Tersangka yang diamankan adalah Uj, AH, AR dan AC. Kelompok ini dikendalikan oleh seorang napi di Rutan Dumai dan seorang napi di Rutan Madaeng Surabaya. Barang bukti yang diamankan 6 kg sabu. Kemudian pengungkapan penemuan 24 Kg sabu di dalam truk di Medang Kampai, Kota Dumai. Hasil pengembangan polisi, dua tersangka dibekuk yakni Sur dan As. Mereka mencoba mengedarkannya ke Medan. Tapi karena ada rasa ketakutan, mereka meninggalkan truk yang berisi 24 Kg sabu. Mereka ini dikendalikan oleh Ad, seorang napi di Lapas Pekanbaru (Okezone, 2020).

Polda Riau mengakui daerahnya sebagai jalur keluar masuknya transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) jaringan internasional. Bahkan Polda Riau menjelaskan bahwa sampai saat ini Malaysia disebut sebagai negara pemasok terbesar narkoba ke Riau. Di beberapa kasus, ada yang dari Singapura dan India (Merdeka, 2013).

Direktur Direktorat Narkoba Polda Riau menjelaskan, hal tersebut disebabkan karena Riau mempunyai luas garis pantai yang luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Selat Malaka sebagai jalur internasional. Hal itu disebabkan lebih dari 1600 Km garis pantai membuat perairan Riau sulit diawasi secara maksimal. Menurut Direktur Direktorat Narkoba Polda Riau, sejak Januari hingga September 2013, sudah terjadi 730 kasus narkoba yang sudah ditangani Polda Riau dengan jumlah tersangka mencapai 1048 orang. Angka tersebut melonjak pesat jika dibanding kasus yang terjadi pada 2012 dengan rentang waktu yang sama, yakni hanya 465 kasus dengan tersangka 745 orang. Artinya, naik sekitar 235 kasus. Untuk kasus narkoba yang paling banyak yakni jenis sabu-sabu, dengan rata-rata usai pengguna umur 30 tahun ke atas. Dari Beberapa kasus yang ditangkap, ada yang (diselundupkan) dari Malaysia, Singapura dan India (Merdeka, 2013).

Terkait hal tersebut, Polda Riau melakukan kerjasama dengan badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) untuk melakukan rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba. Selain itu, dia menambahkan, di Riau para pengguna narkoba mayoritas berusia di atas 30 tahun. Dari data yang dihimpun Polda Riau yang tercatat pada tahun 2012 yakni telah disita barang bukti ganja sebanyak 68.271,82 gram, ekstasi 3.360,4 butir, sabu 5.613,15 gram dan happyfive 159 butir. Sementara pada 2013, pihaknya mencatat terjadi peningkatan barang bukti yang disita yakni 183.475,09 gram ganja, 5.788,7 butir ekstasi, 6.366,73 gram sabu dan 634 butir happyfive (Merdeka, 2013).

Kasus lainnya yang berhasil diungkap terkait sindikat penyeludupan narkoba dari Malaysia adalah kasus yang terjadi pada September 2020, dimana Sindikat narkoba Malaysia memanfaatkan seorang warga Riau memasok 10 kilogram sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi ke Indonesia. Benda haram itu rencananya dibawa ke Kota Dumai setelah dipasok melalui pantai di Desa Tanjung Leban Kabupaten Bengkalis. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Komisaris Besar Suhirman menjelaskan, pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap pria inisial RS. Sebelumnya, petugas mendapat informasi dari masyarakat yang menyebut RS baru pulang dari Malaysia membawa sabu (Liputan6, 2020).

Suhirman memerintahkan anggotanya ke Desa Tanjung Leban untuk mencari RS. Beberapa hari di desa itu, petugas melihat RS mengendarai motor pulang ke sebuah rumah yang diintai petugas. RS menyebut berangkat dari Malaysia memakai

speedboat bersama dua orang. Sampai di pantai, dua orang tadi kembali ke Malaysia sementara RS diminta mengantarkan sabu dan ekstasi ke rumah pria inisial KD. Berdasarkan keterangan RS ini, KD tertangkap di rumahnya di Jalan Arifin Ahmad, desa tersebut. Setelah interogasi cukup lama, akhirnya KD mengaku menerima 10 kilo sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi. Jarak rumah KD dengan kebunnya sekitar 3 kilometer. Setelah mengambil semua barang bukti itu, petugas membawa kedua tersangka ke Polda Riau untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam kasus ini, masih ada beberapa target buruan. Rencananya, KD akan membawa sabu dan ekstasi itu ke Kota Dumai, selanjutnya ke Pekanbaru untuk diedarkan ke berbagai provinsi di Pulau Sumatra.

Kepada petugas, tersangka RS mengaku dijanjikan Rp100 juta oleh jaringan narkoba Internasional karena perannya membawa sabu dan ekstasi dari Malaysia. Sementara tersangka KD mengaku dijanjikan Rp50 juta. Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dia terancam hukuman paling ringan lima tahun, paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup bahkan hukuman mati. Suhirman menyebut pantai timur Riau atau Pulau Sumatra sangat rawan penyelundupan narkoba. Pihaknya sudah bekerjasama dengan Polda lain yang satu pantai dengan Riau untuk menjaga barang ilegal dari Malaysia tidak masuk. Juga bekerjasama dengan Malaysia karena mereka tak ingin ada penyelundupan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Kebijakan Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Menangani Penyeludupan Narkoba Di Provinsi Riau Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat diambil kesimpulan yaitu Pemerintah Indonesia melalui Provinsi Riau bekerja sama dengan Malaysia dalam upaya pemberantasan penyeludupan narkoba dengan mengambil beberapa kebijakan yaitu Respon Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Terhadap Peredaran Narkoba, Indonesia – Malaysia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, Direktorat Polair Polda Riau dengan Polisi Diraja Malaysia melakukan penandatanganan kerjasama, Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama Antara POLRI dan PDRM, dan Pertukaran Informasi.

Penanganan kasus narkoba yang terjadi di Provinsi Riau perlu kerja sama

semua instansi terkait terutama pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus dan memberantas jaringan narkoba lintas negara. Tentunya yang didasari oleh asal narkoba datang yang mayoritas dari Malaysia yang memiliki perbatasan langsung di darat dan laut. Namun, kedua negara masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, seperti ditunjukkan dengan kurangnya patrolibersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. 2010. Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional. Dari <http://www.antaraneews.com/print/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatantransnasional>. Diakses 22 Juli 2020.
- Berita Satu. 2019. Jokowi Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba Lewat Perpres 47/2019. <https://www.beritasatu.com/nasional/565213/jokowi-tegaskan-komitmen-berantas-narkoba-lewat-perpres-472019>. Diakses 5 Desember 2020.
- \_\_\_\_\_. 2010. Produksi Opium Meningkat di Kawasan Segitiga Emas. Dari <http://www.antaraneews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasansegitiga-emas>. Diakses 22 Juli 2020.
- BNN. 2015. Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- \_\_\_\_\_. 2016. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2015. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- \_\_\_\_\_. 2020. Badan Narkotika Nasional RI. Dari <http://www.bnn.go.id/>, Diakses 8 Juni 2020.
- CNN. 2015. Peredaran Narkotik Lewat Internet Terus Meningkat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626140722-12-62605/peredaran-narkotik-lewat-internet-terus-meningkat>. Diakses 15 Oktober 2020.
- Charles, H. Cooley. 2000. *Sociologycal Theory and Social Resourches*. New. York : Henry Holt and Company.
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi. 1995. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Deplu. 2010. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Dirjen Kerjasama ASEAN.
- Detik.com. 2016. Polda Riau dan Polisi Malaysia Perketat Pengawasan Narkoba di Selat Malaka, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3351673/polda-riau-dan-polisi-malaysia-perketat-pengawasan-narkoba-di-selat-malaka>. Diakses 20 januari 2021.
- Goriau. 2019. Malaysia Bantu Riau Memberantas Peredaran Narkoba yang Masuk dari Negeri Jiran, dalam <https://www.goriau.com/berita/baca/malaysia-bantu-riau-memberantas-peredaran-narkoba-yang-masuk-dari-negeri-jiran.html>. Diakses 20 Januari 2021.

- Gunawan, A. 2019. Riau Antisipasi Masuknya Narkoba dari Malaysia, dalam <https://sumatra.bisnis.com/read/20191023/533/1162578/riau-antisipasi-masuknya-narkoba-dari-malaysia>. Diakses 20 Januari 2021.
- Hallo Riau. 2020. Gubri Berharap Kerjasama dengan Malaysia Bisa Atasi Penyelundupan Narkoba ke Riau, dalam <https://www.halloriau.com/read-otonomi-125951-2020-02-19-gubri-berharap-kerjasama-dengan-malaysia-bisa-atasi-penyelundupan-narkoba-ke-riau.html>. Diakses 20 Januari 2021.
- Holsti, KJ. 1998. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis Jilid II*. Terjm.Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Interpol. 2005. Penandatanganan Nota Kesepahaman Polri–PDRM, dalam [http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc\\_download/68-hal52-a4da08](http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-hal52-a4da08). Diakses 20 Januari 2021.
- Istiqomah, Ratih Nur. 2016. *Strategi Hubungan Indonesia dan Malaysia Dalam Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015*. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 2, No. 1.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approches*. Edisi ke-5. Oxford: Oxford University Press.
- Kartasasmita, Koesnadi. 1997. *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Kompas. 2020. Polda Riau Bongkar Penyelundupan 35 Kilogram Sabu dari Malaysia. Dari <https://regional.kompas.com/read/2020/02/09/14150071/polda-riau-bongkar-penyelundupan-35-kilogram-sabu-dari-malaysia?page=all>. Diakses 8 Juni 2020.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Suatu Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Liputan6. 2015. Infografis: Peta Penyelundupan Narkoba di Indonesia. Dari <https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia>, Diakses 8 Juni 2020.
- Liputan6. 2019. Warga Malaysia Kendalikan Peredaran 90 Kilogram Sabu ke Pulau Sumatera. Dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4088909/warga-malaysia-kendalikan-peredaran-90-kilogram-sabu-ke-pulau-sumatera>, Diakses 8 Juni 2020.
- Liputan6. 2020. Mengintai Gerak-Gerik Sindikat Narkoba Asal Malaysia Pasok Sabu dan Ekstasi ke Dumai, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/4344277/mengintai-gerak-gerak-sindiket-narkoba-asal-malaysia-pasok-sabu-dan-ekstasi-ke-dumai>. Diakses 20 Januari 2021.
- Mas'oe'd, Mohtar. 2015. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

- Merdeka.com. 2013. Polda Riau: Malaysia pemasok narkoba terbesar ke Riau, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-riau-malaysia-pemasok-narkoba-terbesar-ke-riau.html>. Diakses 20 Januari 2021.
- Merdeka.com. 2015. Polisi Diraja Malaysia dan Polda Riau kerja sama perketat Selat Malaka, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-diraja-malaysia-dan-polda-riau-kerja-sama-perketat-selat-mala.html>. Diakses 20 Januari 2021.
- Merdeka.com. 2019. Narkoba dari Malaysia Digagalkan Masuk Indonesia. Dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/narkoba-dari-malaysia-digagalkan-masuk-indonesia.html>. Diakses 8 Juni 2020.
- Merdeka.com. 2019. Sindikat Narkoba Jaringan Malaysia Ditangkap di Riau. Dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sindikatanarkoba-jaringan-malaysia-ditangkap-di-riau.html>. Diakses 8 Juni 2020.
- Okezone. 2020. 17 Pengedar Narkoba di Indonesia Dikendalikan Mafia dari Malaysia, dalam <https://news.okezone.com/read/2020/10/09/340/2290918/17-pengedar-narkoba-di-indonesia-dikendalikan-mafia-dari-malaysia>. Diakses 20 Januari 2021.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Priangani, Kunkunrat, & Nurindah, S. 2020. Kerjasama Indonesia- Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan. *Jurnal Dinamika Global*. Vol. 5 No. 1, h. 27-46.
- Rahman, Aulia. 2016. Ancaman Peredaran Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Manusia. *Sosio Informa*. Vol. 2, No. 03, h. 274-290.
- Riau.go.id. 2015. Polair Polda Riau Dan Polisi Diraja Malaysia Gelar Latihan Bersama, dalam <https://www.riau.go.id/home/content/2015/02/09/2960-polair-polda-riau-dan-polisi-diraja-malaysia-gelar-latihan>, diakses 20 Januari 2021.
- Serambinews. 2020. Transaksi Narkoba via Online Meningkat Selama Pandemi, <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/13/transaksi-narkoba-via-online-meningkat-selama-pandemi>. Diakses 15 Oktober 2020.
- Simamora, R. 2016. Kerjasama Amerika Serikat-Meksiko Dalam Penanganan Money Laundering Dari Meksiko Ke Amerika Serikat. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Simanungkalit, Parasian. 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penyalahgunaannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Smith, Michael dan Brian Hocking. 1990. *World Politics: An Introducing To International Relations*. Harvester Wheatsirf.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Metodologi Ilmu Politik*. Surabaya: Fisip-UNAIR Press.
- Tirto. 2017. Ironi Pemberantasan Narkoba Era Jokowi. <https://tirto.id/ironi-pemberantasan-narkoba-era-jokowi-ctyY>. Diakses 5 Desember 2020.

UNODC. World Drug Report. Dari <http://www.unodc.org/>; 2018. Diakses 8 Juni 2020.

VOAIndonesia. 2012. Indonesia Diduga Jadi Sasaran Transaksi Narkotika Online. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diduga-jadi-sasaran-transaksi-narkotika-online--143476876/106349.html>. Diakses 15 Oktober 2020.